



BPKAD

2024

LKIP BPKAD KOTA CIMAHI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini.

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Amin.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



HARJONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2023-2026 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset.

Selama tahun anggaran 2024, BPKAD didukung penyediaan anggaran Pendapatan sebesar Rp. 821.592.891.611,00, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp.815.764.617.880,00 atau 99,29%, serta didukung dengan anggaran Belanja yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.15.000.740.310,00, belanja modal sebesar Rp. 142.525.000,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 14.420.320.347,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.14.124.376.084,00 atau 47,78%

yang terdiri dari Rp.13.678.457.375,00 atau 91,19% untuk belanja operasional, Rp.135.829.000,00 untuk belanja modal atau 95,30% dan 310.089.709,00 atau 2,15% untuk belanja tidak terduga.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pada tahun 2024 fokus utama pencapaian kinerja khususnya dalam penataan utilisasi aset daerah sudah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Penggunaan aplikasi Persegi untuk pencatatan persediaan dan Grafis dalam penatausahaan aset tetap;
2. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Beberapa hal di atas dilakukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD, legalisasi kepemilikan aset, mempercepat ketersediaan dan meningkatkan kualitas data keuangan dan aset serta pemanfaatan aset guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Mengacu kepada hasil nilai LKIP BPKAD tahun 2023 yang memperoleh nilai 84,45 dengan predikat A, ada beberapa perbaikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yang didasarkan kepada LHE Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nomor : 700.02/113/Sekre dari Inspektorat Kota Cimahi. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut agar BPKAD melakukan perbaikan dalam penyusunan monitoringg renaksi triwulan dengan memberikan faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan tugas di BPKAD yang dilaksanakan di tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2024 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2024, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 104,08 %.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2024 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	73,5%	82,5 %	112,24 %
Rata - Rata Capaian						104,08 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi.....	2
1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi	2
1.3.2 Isu Strategis.....	6
1.4 Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi	10
2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-2026.....	11
2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran	12
2.4 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Akuntabilitas Kinerja	39
3.2 Pengukuran Kinerja.....	41
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	55
3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	57
3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	60
3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	61
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	63
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	64
3.4.1 Belanja Operasional.....	65
3.4.2 Belanja Modal	66
3.4.3 Belanja Tidak Terduga.....	66
3.5 Evaluasi Kinerja.....	66
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pelaporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 tingkat pencapaiannya sebesar 104,08%. Hal ini didukung oleh pencapaian atas tiga indikator yaitu 100% yaitu (1) penyusunan APBD yang tepat waktu dan (2) prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan satu indikator utama lainnya yaitu rasio utilisasi aset mencapai 112,24 %.

Mengacu kepada hasil yang diuraikan di atas, maka pada tahun 2024 BPKAD berusaha mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja di ketiga indikator terutama pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam memenuhi target akhir rencana strategis rasio utilisasi sebesar 72,5% yaitu :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
3. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam

rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 35 PNS dan 2 orang P3K.

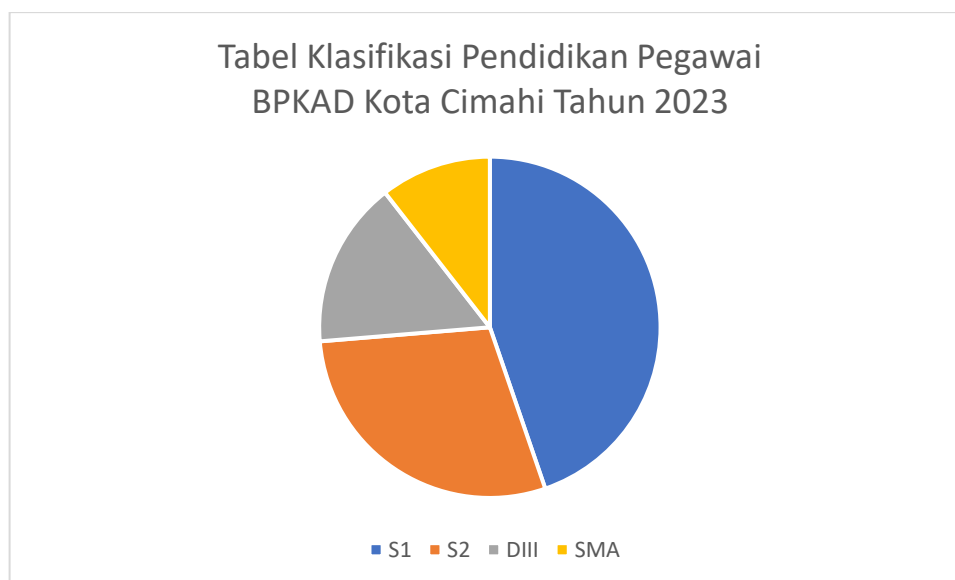
Tabel 1.1

Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV / c	1 Orang
Pembina Tk I	IV / b	1 Orang
Pembina	IV / a	3 Orang
Penata Tk I	III / d	4 Orang
Penata	III / c	9 Orang
Penata Muda Tk I	III / b	7 Orang
Penata Muda	III / a	7 Orang
Pengatur Tk I	II / d	3 Orang
P3K	09	1 Orang
P3K	07	1 Orang
Jumlah		37 Orang

Pegawai BPKAD dalam mencapai kinerja yang dibutuhkan diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan.

Gambar 1.1.
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

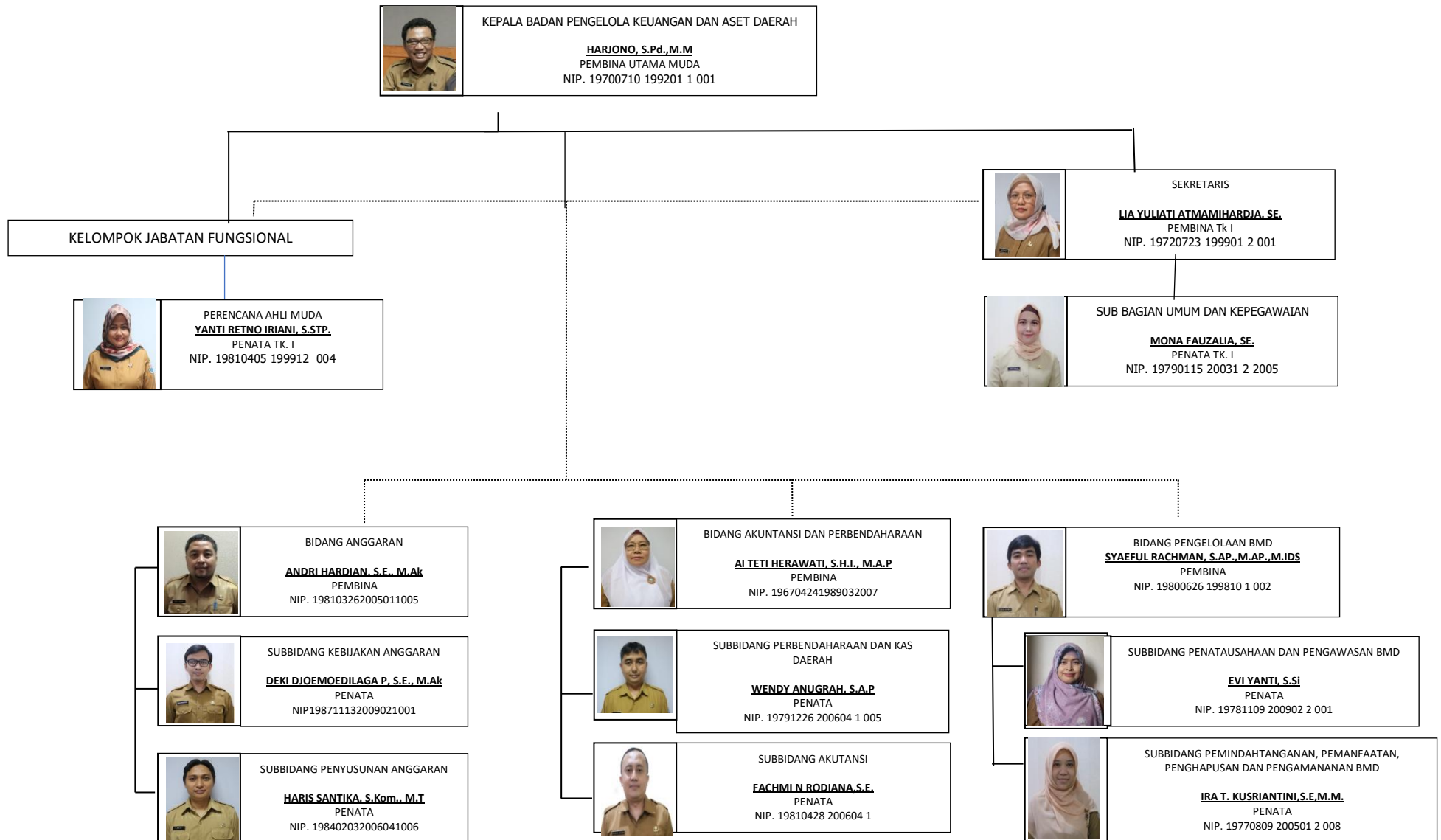
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Magister / S2	11 Orang
Sarjana / S1	17 Orang
Diploma /D3	6 Orang
SLTA / Sederajat	3 Orang
Jumlah	37 Orang

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 17 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 11 orang serta D-III sebanyak 6 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 3 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 29 orang atau 78,3 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2024. Tetapi dilihat dari jumlah pegawai masih dinilai kurang dilihat dari susunan analisis jabatan yang ada.

Selain pegawai dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan dan mesin berkondisi baik yang dimiliki.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

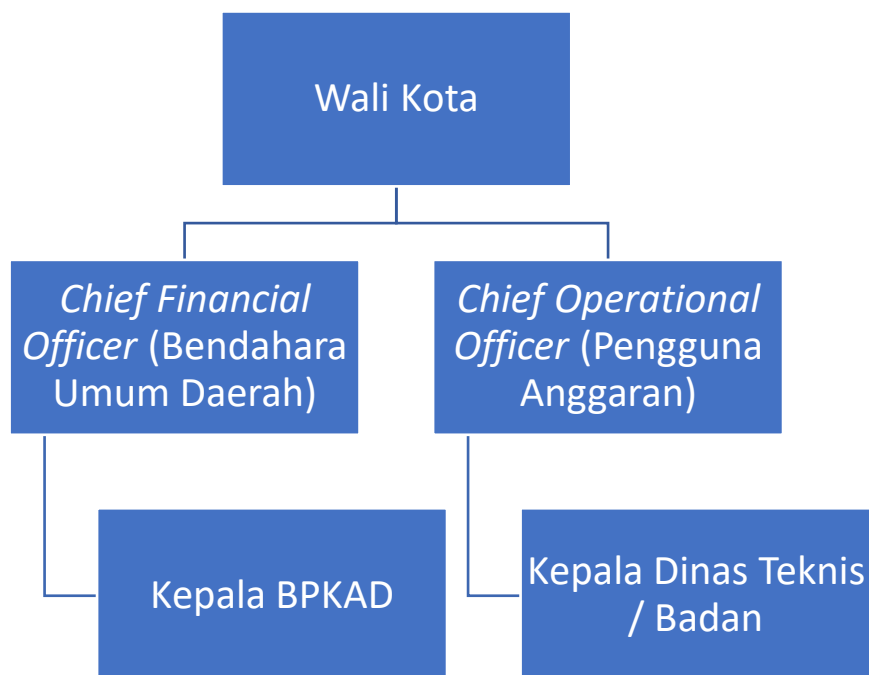


1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Wali Kota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu urusan tertentu pemerintahan.

Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Adapun Misi yang tercantum dalam RPJPD untuk periode 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Terkait dengan misi, urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Dalam RPD 2023-2026 Kota Cimahi BPKAD masuk kedalam tujuan kota nomor 3 meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan sasaran Opini BPK.

Selain itu dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD. Isu-isu strategis BPKAD untuk tahun 2024, yaitu :

1. Implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan (Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan);
2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan tepat guna;
3. Implementasi aplikasi penatausahaan aset;
4. Pengamanan aset.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis diatas adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
2. Adanya pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD;
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sertifikasi tanah dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Persegi dan Grafis;
5. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset;
6. Evaluasi perencanaan dan penganggaran pada tahun sebelumnya.

Kemudian dalam rangka mempertahankan Opini WTP Pemeriksaan BPK RI 11 kali berturut-turut, BPKAD memiliki tantangan berupa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SIPD RI yang baru sehingga pada tahun 2024 mengharuskan menggunakan 2 aplikasi

yaitu SIPD dan SIPKD Nextgen karena SIPD baru masih dalam proses pengembangan. Upaya yang dilakukan dengan meminta pendampingan kepada tenaga ahli SIPD Pusdatin Kemendagri.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2024;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2024;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan BPKAD haruslah searah dan sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan dari Kota Cimahi baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJP Kota Cimahi berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menentukan visi, misi, dan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perencanaan Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2024 merupakan indikator kinerja yang mengaju kepada RPD 2023-2026 yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 pada Tahun 2024 terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator.

IKU

Berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis

Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

IKU

1. Penetapan APBD Tepat Waktu
2. Presentase Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Rasio Utilisasi Aset

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi yang tercantum pada RPD.

Visi Kota Cimahi yaitu “Cimahi Kota Cerdas”. Dengan penjelasan bahwa:

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari

- **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
- **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

BPKAD menjalankan visi Wali kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026. Pada dasarnya penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 9 program prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.3 Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023. Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan

suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2023 – 2026 adalah :

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran
			2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
			3. Rasio Utilisasi Aset	50%	60%	70%	72%	73,5%	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selain keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam pencapaian target BPKAD tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kerjasama baik internal antar bidang maupun eksternal dari perangkat daerah. Oleh karena itu crosscutting dalam pencapaian target BPKAD dapat dilihat pada :

Tabel 2.2
Crosscutting Kinerja BPKAD

No	Target Kinerja	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	
			Internal BPKAD	Eksternal
1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penyusunan KUA-PPAS menunggu RKPD ditetapkan	Sub bidang Kebijakan Anggaran dan Sub bidang Penyusunan Anggaran	Bappelitbangda
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan laporan keuangan tingkat kota yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Perangkat Daerah	Sub bidang Akuntansi dan Sub bidang Perbendaharaan	Seluruh Perangkat Daerah
3	Rasio Utilisasi Aset	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub bidang Penatausahaan dan Pengawasan, Sub bidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengamanan BMD dan Sub bidang Akuntansi	Seluruh Perangkat Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		Rasio Utilisasi Aset Daerah	73,5%

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Tabel. 3.1
Pendanaan BPKAD Murni dan Perubahan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				49.200.290.494,21	35.954.737.188,00	36.867.776.809,00		49.533.866.830,37
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				49.200.290.494,21	35.954.737.188,00	36.867.776.809,00		49.533.866.830,37
KEUANGAN				49.200.290.494,21	35.954.737.188,00	36.867.776.809,00		49.533.866.830,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50,50 Indeks 81 Nilai 71 (BB) Nilai	76 Indeks 81,05 Nilai A Nilai	19.478.906.900,21	10.677.902.630,00	15.671.554.630,00	76,00 Nilai 81.65 Nilai A nilai	20.159.229.730,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 persen	31.845.000,00	73.188.000,00	73.188.000,00	100 Persenn	31.845.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	23.115.000,00	65.272.000,00	61.171.000,00	8 Dokumen	23.115.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	8.730.000,00	7.916.000,00	21.016.000,00	2 Laporan	8.730.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan BPKAD	12 Bulan	12 Bulan	18.463.957.458,21	9.506.772.500,00	9.506.772.500,00	100 Persen	18.833.087.767,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	504 Orang/bulan	18.456.515.458,21	9.499.633.500,00	14.499.633.500,00	38 Orang/bulan	18.825.645.767,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.440.000,00	4.257.000,00	1.857.000,00	1 Laporan	4.440.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.002.000,00	2.882.000,00	1.122.000,00	1 Laporan	3.002.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Pencatatan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.714.500,00	55.285.350,00	55.285.350,00	100 Persen	55.285.350,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4 Laporan	1.714.500,00	55.285.350,00	43.999.350,00	4 Laporan	55.285.350,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Data Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	62.150.000,00	62.150.000,00	100 Persen	62.150.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	110 Orang	10.000.000,00	62.150.000,00	62.150.000,00	50 Orang	62.150.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum di BPKAD	100 Persen	100 Persen	588.195.900,00	662.678.600,00	662.678.600,00	100 Persen	609.144.700,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	159.184.000,00	209.421.000,00	182.199.000,00	4 Paket	159.184.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	53.722.200,00	50.204.000,00	50.204.000,00	2 Paket	50.204.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.069.800,00	27.069.600,00	27.069.600,00	1 Paket	27.069.800,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	223.362.900,00	261.092.000,00	288.278.000,00	12 Laporan	278.472.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	85.707.000,00	81.747.000,00	81.747.000,00	1 Dokumen	61.069.900,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.150.000,00	33.145.000,00	33.145.000,00	1 Dokumen	33.145.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	146.178.042,00	84.000.000,00	84.000.000,00	100 Persen	333.888.733,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	146.178.042,00	84.000.000,00	84.000.000,00	2 Unit	333.888.733,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang di BPKAD	100 Persen	100 Persen	20.516.000,00	20.516.000,00	20.516.000,00	100 Persen	20.516.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	12 Laporan	5.400.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	15.116.000,00	15.116.000,00	15.251.000,00	2 Laporan	15.116.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 Persen	100 Persen	216.500.000,00	213.312.180,00	213.312.180,00	100 Persen	213.312.180,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	216.500.000,00	213.312.180,00	213.312.180,00	12 Unit	213.312.180,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu 2. Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	28.138.792.894,00	23.623.525.858,00	19.587.614.529,00	100 persen	28.124.637.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 persen	100 Persen	1.266.154.344,00	2.128.625.458,00	2.128.625.458,00	100 Persen	1.349.637.100,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	83.402.600,00	190.956.600,00	169.106.600,00	2 Dokumen	88.599.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	79.650.750,00	77.950.500,00	77.950.500,00	2 Dokumen	76.963.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	232.660.200,00	368.734.508,00	339.549.508,00	30 Dokumen	232.660.200,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	60 Dokumen	265.529.644,00	288.065.400,00	268.955.400,00	60 Dokumen	292.262.400,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	21.711.700,00	20.735.600,00	19.433.600,00	30 Dokumen	21.711.700,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	21.711.700,00	20.871.400,00	20.871.400,00	30 Dokumen	21.711.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								

	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.128.600,00	97.828.500,00	164.635.500,00	2 Dokumen	100.128.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	8 Dokumen	99.192.200,00	158.092.100,00	137.842.100,00	6 Dokumen	99.192.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	150.360.650,00	245.913.650,00	233.533.650,00	3 Dokumen	217.609.500,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	76.176.350,00	523.837.350,00	521.437.350,00	3 Dokumen	76.176.400,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	55.888.550,00	53.348.500,00	53.348.500,00	1 Dokumen	53.076.400,00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	79.741.400,00	82.291.350,00	95.001.400,00	120 Orang	69.546.000,00

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	360.799.100,00	340.057.000,00	340.057.000,00	100 Persen	300.000.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	24.391.600,00	23.511.000,00	19.431.000,00	12 Dokumen	52.613.200,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240 Dokumen	240 Dokumen	36.727.800,00	34.805.000,00	24.605.000,00	480 Dokumen	26.727.800,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	41.331.000,00	38.926.000,00	32.126.000,00	7 Dokumen	31.331.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)								

	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	42.478.900,00	40.876.000,00	30.676.000,00	12 Laporan	32.478.900,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132 Dokumen	132 Dokumen	39.673.300,00	38.233.000,00	21.913.000,00	120 Dokumen	29.673.300,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	64.468.300,00	60.985.000,00	0,00	1 Dokumen	50.000.000,00

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	220 Orang	111.728.200,00	102.721.000,00	151.706.000,00	40 Orang	77.175.800,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Akuntansi yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	840.846.950,00	829.070.950,00	829.070.950,00	100 Persen	775.000.000,00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	22 Dokumen	22 Dokumen	34.677.800,00	33.317.800,00	36.887.800,00	22 Dokumen	34.677.800,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	458.285.550,00	456.685.550,00	461.515.550,00	3 Laporan	392.438.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								

	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	71.823.400,00	71.423.400,00	68.861.400,00	2 Dokumen	71.823.400,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	36.442.000,00	33.642.000,00	25.242.000,00	1 Dokumen	36.442.000,00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	69.308.000,00	66.492.000,00	66.492.000,00	1 Dokumen	69.308.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	61.810.200,00	59.410.200,00	59.410.200,00	1 Dokumen	61.810.200,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	53.268.000,00	53.268.000,00	53.268.000,00	30 Orang	53.268.000,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga	28.747.200,00	28.747.200,00	28.747.200,00	15 Lembaga	28.747.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah								
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	26.484.800,00	26.084.800,00	26.084.800,00	1 Laporan	26.484.800,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	25.500.000.000,00	20.175.000.000,00	20.175.000.000,00	100 Persen	25.500.000.000,00
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	2 Laporan	500.000.000,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	16.005.970.621,00	1 Laporan	25.000.000.000,00

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Keteraksesan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 Bulan	170.992.500,00	150.772.450,00	150.772.450,00	12 Bulan	200.000.000,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.992.500,00	150.772.450,00	198.012.450,00	1 Dokumen	200.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.582.590.700,00	1.653.308.700,00	1.608.607.650,00	100 persen	1.250.000.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan BMD (siklus BMD)	100 Persen	100 Persen	1.582.590.700,00	1.653.308.700,00	1.653.308.700,00	100 persen	1.250.000.000,00
Penyusunan Standar Harga								
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	273.312.000,00	224.723.850,00	4 Dokumen	165.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	37.174.100,00	34.054.100,00	34.054.100,00	2 Dokumen	50.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.426.600,00	16.208.600,00	16.208.600,00	2 Dokumen	35.000.000,00

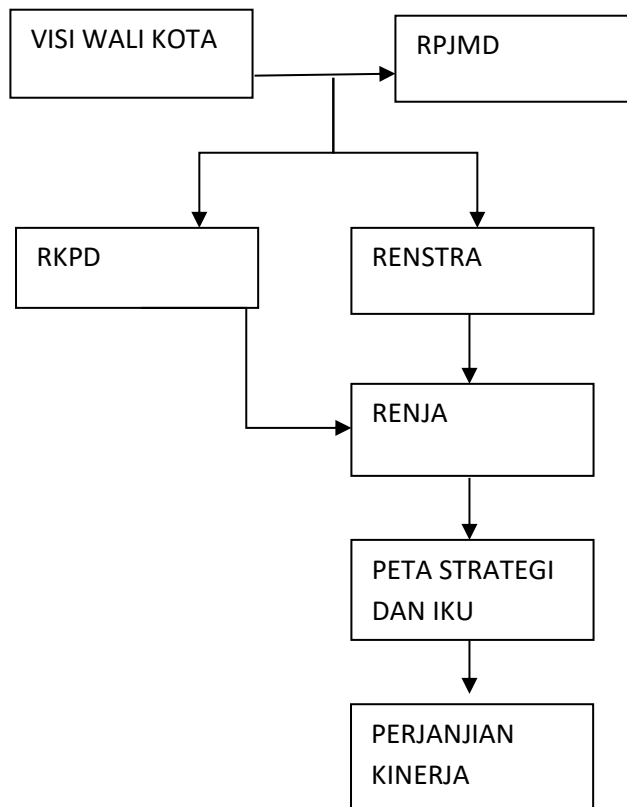
Penatausahaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	189.990.000,00	174.062.000,00	174.062.000,00	10 Laporan	75.000.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	86.360.000,00	86.360.000,00	3 Laporan	150.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	15 Laporan	15 Laporan	600.000.000,00	596.392.000,00	560.892.100,00	50 Laporan	325.000.000,00
Penilaian Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	205.000.000,00	194.602.000,00	236.607.000,00	4 Laporan	160.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	21.624.000,00	21.624.000,00	4 Laporan	25.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	146.392.000,00	119.894.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	12.800.000,00	36.680.000,00	5 Laporan	15.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	100.000.000,00	97.502.000,00	97.502.000,00	247 Orang	100.000.000,00

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1
Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
	2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100 %
	3. Rasio Utilisasi Aset	73,5 %

Perjanjian kinerja dibuat setelah RKA dan DPA ditetapkan karena di dalam perjanjian kinerja tercantum anggaran dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan dalam pencapaian target. Rencana Kerja Anggaran (RKA) telah diselaraskan dengan rencana kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Tercantum 3 Program 14 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang telah selaras dari rencana kerja, RKA dan DPA pada tahun 2024.

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2024.

Program	Anggaran (Rp)	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.864.877.382	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	18.090.100625	100%
Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.608.607.650	100%
Jumlah	29.563.585.657	100%

Selain itu sebagai tindaklanjut dari program dan kegiatan yang disusun, BPKAD Kota Cimahi juga melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Rencana aksi memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan baik dari segi program, kegiatan hingga subkegiatan. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan per triwulan oleh Kepala BPKAD melalui rapat kerja internal per triwulan. Berikut rencana aksi BPKAD Tahun 2024 :

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI**

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV		
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10		11	12	13				14
	MENINGKATNYA KUALITAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BPKAD					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A Nilai			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		2	2	7 dokumen (RKA, RKA-P, DPA,DPPA, Renja, Renja Perubahan, Forum OPD)	
			Nilai IKM Perangkat Daerah			81.05 Nilai			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1				1	2 dokumen (LKIP dan SKM)						
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	38	38	38	38	36 orang PNS dan 2 orang P3K (14 bulan Gaji) (12 bulan tunjangan kinerja objekif lainnya, JJK, JKM, BPJS)					
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1				1 dokumen (Laporan Tahunan)						
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan				1	1 dokumen (Laporan Keuangan Semesteran)						
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	4 laporan stock opname					
									Indeks Profesionalitas ASN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Kepegawaian di BPKAD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-	orang		50	50 orang pegawai BPKAD					
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3			3 paket						
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3	3	3	3	paket=bulan (12 paket)					

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan pertriwulan dievaluasi dan dibahas terkait kendala-kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal serta solusi bersama dari setiap permasalahan.

BPKAD pada tahun 2023 telah menyusun LKIP yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi. Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2023 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 80,80 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30	27,00	90,00
B.	Pengukuran Kinerja	30	22,20	74,00
C.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	90,00
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75	87,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	84,45	84,45

Mengacu kepada hasil review oleh Inspektorat, maka nilai terendah berada pada aspek pengukuran kinerja yaitu hanya 22,20 dari kemungkinan total 30 atas poin tersebut, Adapun catatan yang perlu diperbaiki atas poin tersebut yaitu melakukan perbaikan dalam penyusunan monev renaksi triwulan dengan memberikan factor pendorong, factor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan, oleh sebab itu hal ini menjadi faktor yang BPKAD perbaiki pada Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2023 - 2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

B. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKAD telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap Sasaran Strategis, semakin besar *coverage* IKU terhadap Sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis semakin bersifat

aktivitas. Berikut keterkaitan IKU BPKAD dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dari Utama	Ket
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD tepat Waktu	Ukuran Penetapan APBD dilihat dari Rangkaian Tanggal Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Ukuran Persentase Laporan Keuangan dilihat dari Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan perangkat daerah kepada BPKAD secara tepat waktu dan sesuai SAP.
			Rasio Utilisasi Aset	Rasio Utilisasi Aset diukur berdasarkan jumlah nilai rata-rata capaian kinerja Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jawaban dari perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan supervisi pimpinan sebagai controlling dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kinerja BPKAD dilaksanakan secara berkala per 3 bulan. Kepala BPKAD memimpin rapat evaluasi dengan melihat rencana aksi dan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan melihat capaian kinerja yang dicapai baik pada tahun jalan ataupun terhadap renstra BPKAD dan juga terkait kendala-kendala yang dapat menghambat capaian kinerja.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, BPKAD menyusun laporan kinerja tahunan 2023 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %
--

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan target IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	73,5 %	82,5 %	112,24 %
Rata - Rata Capaian						104,08 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 104,08 % atau bermakna sangat berhasil, dalam pencapaian sasaran strategis ini BPKAD mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel di atas. Berikut penjabaran hasil dari masing-masing indikatornya :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu

Dalam proses penyusunan APBD, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah dengan 12 sub kegiatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 2.193.090.078 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.972.284.360 atau 89,93% dan

capaian fisik sebesar 100% yang dimana keseluruhan sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan APBD Kota Cimahi tepat waktu.



APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 105 ayat 3c disebutkan bahwa Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama (1) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada prinsipnya kinerja penyusunan APBD selama tahun 2024 adalah proses penyusunan APBD untuk Tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2025, maka berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun oleh BPKAD :

Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi

NO	URAIAN	ATURAN	REALISASI 2023	KETERANGAN
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II Juli	12 Juli 2024	Sesuai

2	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II Agustus	7 Agustus 2024	Sesuai
3	Kesepakatan antara Wali Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi atas Rancangan PPAS	Minggu II Agustus	7 Agustus 2024	Sesuai
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota Cimahi Kepada DPRD Kota Cimahi	Paling lambat minggu IV Bulan September	12 September 2024	Sesuai
5	Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran	20 November 2024	Sesuai
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD untuk di evaluasi	3 hari setelah persetujuan bersama	25 November 2024	Sesuai
7	Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD	15 Hari Kerja	17 Desember 2024	Sesuai
8	Penyempurnaan Rancangan Perda APBD sesuai evaluasi	7 hari kerja setelah evaluasi	21 Desember 2024	Sesuai
9	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perdat APBD kepada Gubernur	3 Hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD	24 Desember 2024	Sesuai
10	Penetapan Perda APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025	Paling lambat 31 Desember	27 Desember 2024	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama penyusunan APBD tahun anggaran 2024, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang perencanaan anggaran dan aset yang membantu Kepala BPKAD untuk mencapai kinerja penetapan APBD tepat waktu. Pada poin ke 5 proses penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai jadwal dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 20 November

2024, dimana batas maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir serta pada poin ke 10 dalam hal penetapan APBD yang dapat ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024 atau sebelum tahun anggaran APBD itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pencapaian target persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP, BPKAD memiliki 3 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan serta Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 sub kegiatan dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah serta memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.301.690.200 dengan capaian realisasi Rp. 1.218.723.620 atau 93,62% serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.



Kerjasama dari kedua sub bidang perbendaharaan dan akuntansi merupakan 2 komponen yang tidak terpisahkan. Sub bidang Perbendaharaan mengawasi agar pelaksanaan penatausahaan

agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan sub bidang akuntansi menerima hasil penatausahaan dan dilakukan pencatatan jurnal-jurnal transaksi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, sub bidang perbendaharaan dibantu dalam penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD sebagai sistem informasi yang dibangun oleh Kemendagri yang dimana alur proses penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020. Sub Bidang Perbendaharaan bertugas memverifikasi berkas yang masuk terkait kesesuaian bukti-bukti transaksi. Begitu juga Sub Bid Akuntansi dalam pencatatan jurnal dibantu menggunakan SIPD Aklap dimana data yang diperoleh merupakan data transfer dari SIPD Penatausahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Unit yang mempunyai fungsi bendahara umum di Kota Cimahi adalah BPKAD selaku SKPKD, sehingga para perangkat daerah hanya diwajibkan menyampaikan lima buah laporan yang selanjutnya harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar Perangkat Daerah

yang telah menyajikan Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan

No.	Nama Perangkat Daerah	Penyajian Laporan Keuangan
1.	Dinas Pendidikan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
2.	Dinas Kesehatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
3.	RSUD Cibabat	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
10.	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
14.	Dinas Perhubungan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
15.	Dinas Komunikasi, informatika,	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
16.	Dinas Arsip Daerah	
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

19.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
20.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
22.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
24.	Sekretariat Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
25.	Sekretariat DPRD	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
26.	Inspektorat Kota	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
27.	Kecamatan Cimahi Utara	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
28.	Kecamatan Cimahi Tengah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
29.	Kecamatan Cimahi Selatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
30.	Kantor Kesatuan Bangsa	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dari 30 perangkat daerah di Kota Cimahi telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2024 sesuai dengan SAP 71 tahun 2010, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang akuntansi dan perbendaharaan yang membantu Kepala BPKAD untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerja.

3. Rasio Utilisasi Aset

Dalam pencapaian target Rasio Utilisasi Aset, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri 11 sub kegiatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.608.607.650 dengan capaian realisasi Rp. 1.532.627.459 atau 95,28% serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.



Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumberdaya. Aset sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis *highest and best use principle*. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal, aspek kelayakan fisik, aspek kelayakan finansial dan produktivitas maksimal.

Untuk memastikan utilisasi atas aset daerah berjalan dengan optimal maka ditetapkanlah IKU Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data pada LKPD, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah serta menghilangkan *oppurtunity loss* atas aset tersebut. Ruang lingkup utilisasi aset yang diukur pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Utilisasi Aset Tetap

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utilisasi	Objek Pengukuran
1	Pemanfaatan	A.Sewa	Nilai Aset yang disewakan
		B.Kerja sama Pemanfaatan	Nilai Aset yang di KSP kan
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	Nilai Aset yang BGS kan
		D.Bangun Serah Guna (BSG)	Nilai Aset yang BSG kan
		E. Pinjam Pakai	Nilai Aset dipinjampakaikan
2.	Penetapan Status Penggunaan	A. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya
		B. Penetapan status penggunaannya karena hibah masuk	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya karena hibah masuk
		C. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	Nilai Aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Aset yang dihibahkan
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset	Nilai aset baru hasil tukar menukar

Target IKU tahun 2024 ditetapkan sebesar 73,5%, hal ini berarti 73,5% dari total aset tetap dan aset tetap lainnya yang dimiliki daerah harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada laporan Barang Milik Daerah, yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 3.6
Daftar Aset Tetap Per SKPD Tahun 2024 (Unaudited)

No	Instansi	MUTASI ASET TETAP TA 2024						
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	62.015.122.872,00	93.420.145.070,36	240.055.645.577,31	599.205.674,00	54.922.012.556,85	837.284.153,00	451.849.415.903,52
2	DINAS KESEHATAN	7.870.642.001,00	55.001.178.972,61	53.347.861.153,00	2.507.837.988,00	61.713.000,00	-	118.789.233.114,61
3	RSUD CIBABAT	28.362.300.000,00	282.836.653.451,24	131.800.977.047,20	7.127.838.639,00	12.025.600,00	88.522.500,00	450.228.317.237,44
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	652.862.352.191,60	13.484.198.355,00	80.624.531.363,00	684.884.559.709,74	534.085.000,00	4.199.738.304,00	1.436.589.464.923,34
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	227.160.587.807,00	15.204.489.688,76	44.224.708.265,00	166.273.778.396,00	15.522.391.815,00	61.482.845,00	468.447.438.816,76
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	17.238.332.048,34	1.930.254.531,00	-	97.119.000,00	-	19.265.705.579,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3.289.876.468,00	-	-	9.800.000,00	-	3.299.676.468,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	4.440.898.824,15	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.089.931.204,76
9	DINAS SOSIAL	40.302.500,00	2.482.221.299,54	-	-	-	-	2.522.523.799,54
10	DINAS TENAGA KERJA	-	1.898.671.600,00	-	-	5.790.000,00	-	1.904.461.600,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14.252.840.000,00	5.185.354.968,41	12.683.273.016,10	4.149.277.550,00	9.000.000,00	-	36.279.745.534,51
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.755.801.960,00	54.335.007.899,76	12.386.335.204,00	5.609.018.027,00	8.800.000,00	-	94.094.963.090,76
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	10.199.559.200,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	-	10.475.905.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.319.000.000,00	43.175.295.055,00	14.101.060.100,00	80.259.503.899,00	3.765.000,00	-	145.858.624.054,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	10.920.757.751,00	2.203.635.075,00	220.487.300,00	-	-	13.344.880.126,00
16	DINAS ARSIP DAERAH	98.000.000,00	2.543.584.729,00	1.533.652.000,00	-	1.793.974.006,00	-	5.969.210.735,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	9.272.750.000,00	15.794.507.714,98	163.129.261.878,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	190.134.631.142,98
18	DPMPSTP	-	36.556.893.665,00	89.548.790.443,05	-	4.440.000,00	-	126.110.124.108,05
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.223.186.450,00	2.457.454.526,00	22.848.174.794,00	258.803.035,00	245.025.000,00	79.619.856,00	61.112.263.661,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	-	4.357.511.768,59	-	-	9.800.000,00	-	4.367.311.768,59
21	BPKAD	-	10.290.759.004,00	-	-	226.000.000,00	-	10.516.759.004,00
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	6.897.292.777,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	7.156.189.207,66
23	BKPSDMD	-	2.282.681.604,00	-	-	-	-	2.282.681.604,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.415.740,00	29.398.408.041,78	57.518.480.573,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	102.593.115.077,00
25	SEKRETARIAT DPRD	2.756.775.000,00	18.229.545.661,0000	13.013.110.134,00	-	2.261.194.720,00	-	36.260.625.515,00
26	INSPEKTORAT KOTA	-	2.861.914.190,00	4.602.724.916,00	-	-	-	7.464.639.106,00
27	KECAMATAN CIMAHU UTARA	10.479.245.000,00	5.814.299.646,11	6.987.914.196,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	23.338.809.695,11
28	KECAMATAN CIMAHU TENGAH	10.039.095.128,00	9.985.583.929,2800	11.216.992.919,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	31.266.831.859,28
29	KECAMATAN CIMAHU SELATAN	14.529.905.000,00	8.485.673.458,94	7.324.802.810,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	30.539.768.445,69
30	KESBANGPOLL	2.075.500.000,00	1.265.825.119,00	-	-	3.446.000,00	-	3.344.771.119,00
	TOTAL	1.122.113.821.649,60	770.334.576.487,51	971.935.288.424,88	954.086.463.428,49	76.761.220.852,47	5.266.647.658,00	3.900.498.018.500,94

Untuk memperoleh nilai dari rasio utilisasi diperlukan perhitungan yang terdiri dari 3 indikator yaitu Penatausahaan BMD, Pemanfaatan BMD dan Pengamanan BMD. Penatausahaan BMD melihat tingkat ketepatan waktu panyampaian laporan rekonsiliasi BMD dan Penetapan Status Pengguna yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk Pemanfaatan BMD dilihat dari jumlah potensi BMD yang akan dimanfaatkan sebanyak 17 area yang telah dinilai/ appraisal terkait kelayakan lokasi dan nilai sewa dan dari keseluruhan potensi 11 lokasi telah berhasil dimanfaatkan dan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 3.7

Daftar Potensi Pemanfaatan BMD

No	Jenis Pemanfaatan	LOKASI	Harga Perolehan Aset (Rp.)			Unit Dimanfaatkan	
			Tanah	Gedung	TOTAL	Unit	checklist
1	Sewa Tanah dan Gedung	BJB Pemkot	22.377.974,21	314.472.982,22	336.850.956,42	1	✓
2	Sewa Tanah	BJB DPRD	1.418.048,55	-	1.418.048,55	1	✓
3	Sewa Tanah	TOWER DPRD	63.812.184,54	-	63.812.184,54	1	✓
4	Sewa Tanah Jalan	Jalan Kota / FO	54.208.399.840,00	-	54.208.399.840,00	108	✓
5	Sewa Gedung	Kantin Sekolah	211.224.757,14	2.560.880.793,69	2.772.105.550,83	61	✓
6	Sewa Tanah dan Gedung	GOR LKMD	467.250.000,00	260.000.000,00	727.250.000,00	1	x
7	Sewa Tanah dan Gedung	Kolam BBI	1.750.000.000,00	1.466.044.000,00	3.216.044.000,00	1	x
8	Sewa Tanah	GOR Sangkuriang	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	1	✓
9	Sewa Tanah	Lapangan Cibaligo	1.715.000.000,00	-	1.715.000.000,00	1	✓
10	Sewa Tanah	Lapangan Poral	1.764.000.000,00	-	1.764.000.000,00	1	x
11	Sewa Tanah	SMP PGRI	64.960.000,00	-	64.960.000,00	1	x
12	Sewa Tanah	Penimbangan Dishub	584.210.000,00	-	584.210.000,00	1	✓
13	Sewa Tanah	Warung contong Dustira	33.750.000,00	-	33.750.000,00	1	x
14	Sewa Tanah	Kapten Iskak	286.300.000,00	-	286.300.000,00	1	x
15	BOT (BGS)	Cimahi Mall	12.764.966.240,00	-	12.764.966.240,00	1	✓
16	MPP	Jl. Aruman	3.982.552.000,00	-	3.982.552.000,00	1	✓
17	Aula	Seluruh Kel/kec				1	✓
	JUMLAH		177.920.221.044,43	4.601.397.775,91	178.539.066.820,33		

Selanjutnya pengamanan BMD melihat dari persentase realisasi jumlah aset Pemerintah Kota Cimahi yang telah disertifikasi dengan melihat target dari jumlah aset yang belum tersertifikasi. Dengan target 465 sertifikat telah terealisasi 309 sertifikat dan 76 sertifikat sedang diproses oleh ATR/BPN Kota Cimahi.

Tabel 3.8
Perhitungan Rasio Utilisasi

	INDIKATOR	TA 2024	KETERANGAN
1	PENATAUSAHAAN BMD		
	Indikator: Laporan Rekonsiliasi BMD Triwulan dan Semester	100%	
2	PEMANFAATAN BMD		
	Indikator: Potensi BMD yang akan dimanfaatkan (17 area)	178.539.066.820,33	Sewa di area Pemkot , Sewa di area Kantor DPRD , Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin Sekolah, GOR Sangkuriang, BBI, Gor LKMD, Lapangan Cibaligo, Lapangan Poral, SMP PGRI, Area di
	BMD yang telah dimanfaatkan (11 area dari target 17 area)	64,71%	Sewa Lahan dan Gedung di area Pemkot (BJB), Sewa Lahan di area Kantor DPRD (ATM BJB dan Tower Telekomunikasi), Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin
3	PENGAMANAN BMD		
	Target sertifikasi (a)	465	
	Realisasi sertifikasi (b)	309	
	Proses sertifikasi (sudah)	76	
	(b+c)/a	0,83	
	%	82,80%	
	Ratio Utilisasi aset	0,83	
	(%)	82,50%	

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa ratio utilisasi aset Pemerintah Kota Cimahi ada pada angka 82,50% yang berarti realisasi melebihi target yang ingin dicapai sebesar 73,5% sesuai tercantum pada Renstra BPKAD 2023-2026.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 :

Tabel 3.8
Perbandingan antara target dan realisasi Rasio Utilisasi
Aset Tetap

Tahun Anggaran 2024			
Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
73,50 %	73,50 %	82,50 %	112,24%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran BPKAD tahun 2024 yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, yang menghasilkan capaian

kinerja sebesar % yang berada di interval $X > 85$ atau bermakna sangat berhasil.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPKAD, selain itu penting bahwa penetapan target dilandasi faktor SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), sehingga target bukan semata-mudah untuk di capai tapi akan dicapai dengan beberapa tantangan demi kemajuan organisasi. Pada prinsipnya Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis BPKAD 2023-2026, pada bagian ini dijelaskan beberapa analisa sederhana mengenai beberapa perbandingan pencapaian target pada tahun ini hingga berakhirnya target akhir rencana strategis BPKAD.



Dalam penyusunan APBD, penganggaran merupakan lanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappelitbangda sehingga berpengaruh kepada penyelesaian APBD. Selain itu proses selanjutnya adalah

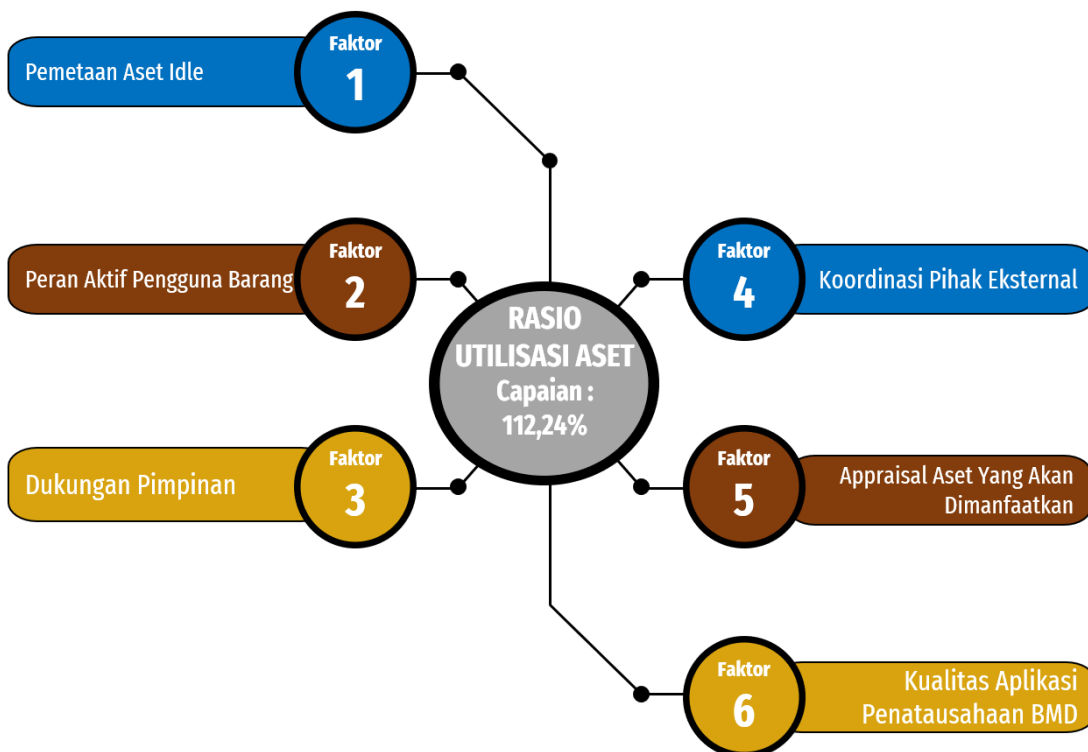
pembahasan dan kesepakatan dengan legislatif terkait isi dari APBD yang akan disusun. APBD merupakan kumpulan dari setiap kegiatan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah. APBD juga membutuhkan reviu dari APIP untuk memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan. Sistem informasi juga sangat dibutuhkan dalam proses penginputan belanja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN



Penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi SDM selaku penyusun yang harus memahami secara baik proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu data merupakan isi dari laporan keuangan yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Komunikasi dan pengawasan memastikan bahwa isi laporan keuangan standar, dan sistematisasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN



Dalam pencapaian rasio utilisasi terdapat 6 faktor yang saling berhubungan, salah satunya pemetaan aset idle sebagai data utama dalam pemanfaatan aset. Selain itu peran aktif pengguna barang dan aplikasi penatausahaan BMD sebagai sarana penyusunan laporan BMD. Koordinasi eksternal dibutuhkan dalam membantu kelancaran dalam pencapaian utilisasi.

3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Analisis atas capaian indikator kinerja atas sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap	75%	8 %	10,67 %

Tabel 3.10

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

Penjelasan Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah		
Penyusunan APBD yang tepat waktu	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah

<p>Target yang ditentukan yaitu tanggal persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Tanggal Penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>Target yang ditentukan yaitu 100 % atau seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.</p>	<p>Target yang ditentukan yaitu 75 % dari total aset tetap yang sesuai laporan barang milik daerah.</p>
<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD. Permasalahan utama dalam menyusun dokumen RAPBD dan APBD adalah kecepatan perangkat daerah dalam proses sinkronisasi data, dikarenakan RAPBD merupakan kumpulan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh perangkat daerah yang telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah harus disiapkan oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing perangkat daerah, dari total 30 (tiga puluh) perangkat daerah mayoritas PPK bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangpahaman para pengurus barang dalam menyusun dokumen laporan inventarisasi barang daerah 2. Keterbatasan SDM yang dapat menguasai teknologi dalam inventarisasi aset di Kota Cimahi 3. Keterlambatan belanja modal yang selalu dibelanjakan pada akhir tahun di hampir seluruh SKPD. 4. Beberapa faktor external seperti proses jangka waktu yang cukup lama untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota 5. Ketersediaan tim penilai barang milik daerah dari

<p>2) Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2024, Kota Cimahi telah menetapkan APBD secara tepat waktu.</p> <p>3. Keterlambatan Penetapan RKPD</p> <p>4. Keterlambatan Penetapan Pedoman Umum Penyusunan APBD.</p>	<p>tahun 2023, Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.</p> <p>3. SIPD Penatausahaan dan Aklap yang masih dalam pengembangan.</p>	<p>kementerian keuangan yang menunggu antrian karena keterbatasan SDM yang ada</p> <p>6. Penggunaan barang yang belum dapat memaksimalkan potensi pemanfaatan asetnya.</p>
<p>Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat penyusunan APBD secara tepat waktu :</p> <p>1. Dalam upaya percepatan penyusunan Rancangan APBD, maka BPKAD menggunakan strategi komunikasi dan koordinasi secara intens dengan sifat menjemput bola ataupun permasalahan ke</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan para perangkat daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan :</p> <p>1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga banyak proses yang dapat diotomatiskan, yang sebelumnya</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset di Pemerintah Kota Cimahi :</p> <p>1. Mengadakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi aset daerah yang disusun mandiri oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Pelatihan dan pendampingan kepada Perangkat</p>

masing-masing perangkat daerah	telah terverifikasi penggunaan sistem tersebut oleh Bidang Akuntansi di BPKAD	Daerah dalam penggunaan aplikasi
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam konsolidasi penyusunan RAPBD hingga APBD	2. Mengadakan Pelatihan SIPD Penatausahaan dan Aklap	3. Menerbitkan surat edaran terkait belanja di akhir tahun
3. Komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak penyusun RKPD	3. Membuka pelayanan konsultasi terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal
Komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri		5. Sosialisasi berkala terkait pemanfaatan BMD

3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap

Target Tahun Lalu

Terdapat perbedaan sasaran serta tolak ukur indikator kinerja BPKAD pada tahun 2020-2024, hal ini dapat tergambar ke dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	50	60	70	72	73,5	66,5	66,7	99,33	71,83	82,5	100%	

Mengacu kepada tabel di atas, pencapaian target kinerja dari BPKAD selama 5 tahun selalu mencapai target. Pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran Perangkat Daerah yang telah

mengumpulkan data ataupun laporan yang menunjang capaian kinerja BPKAD. Pembinaan, koordinasi, konsultasi, pelatihan dan penyusunan SOP atau Sistem dan prosedur merupakan beberapa bentuk cara dari BPKAD memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah.

3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Analisis atas capaian indikator kinerja terhadap target akhir pencapaian sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Tahun-N Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	82,50 %	73,5 %	100 %

Berdasarkan data di atas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2024 ini, dari 3 (tiga indikator) yang mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, ketiga indikator telah tercapai sesuai target. Realisasi pencapaian akhir

target pada indikator penyusunan APBD yang tepat waktu dan presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta rasio utilisasi aset pada akhir tahun dalam renstra telah tercapai.

3.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKAD selama tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Daftar Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan BMD	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu (100)	89,93%	10,67%
		Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	93,62%	6,37%
		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	112,24	95,28 %	4,72%

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing dari indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari tiga indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja BPKAD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, berikut merupakan tabel pemetaan kegiatan yang ada di BPKAD :

Tabel 3.14
Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan BPKAD

Bidang	Total Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
Sekretariat	9 Kegiatan	10.039.877.382	9.090.774.624	90,54%	9,46%
Anggaran	1 Kegiatan	2.193.090.078	1.972.284.360	89,93%	10,07%
Akuntansi dan Perbendaharaan	3 Kegiatan	1.301.690.200	1.218.723.620	93,62%	6,37%
Pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1.608.607.650	1.532.627.459	95,28%	4,72%
Belanja Tidak Terduga	1 Kegiatan	14.420.320.347	310.089.709	2,15%	97,85%
JUMLAH BPKAD	14 Kegiatan	29.563.585.657	14.124.499.772	47,78%	52,22%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi dan tingkat efisiensi belanja dari tiap bidang cukup baik, hanya saja anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya berdasarkan keadaan darurat, keperluan mendesak, bantuan sosial tidak terencana dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BPKAD Kota Cimahi telah menyusun Perwal dan SOP terkait penggunaan BTT sehingga dapat memudahkan Perangkat Daerah untuk mengajukan penggunaan dana BTT.

3.3.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPKAD selama tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Daftar Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-
2.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-
3.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-
4.Pengelolaan Barang Milik Daerah	-

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berdampak akan pencapaian kinerja diantaranya terdapat di masing-masing bidang seperti kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang dimana kegiatan tersebut memiliki 11 sub kegiatan yang saling berkesinambungan dalam pencapaian penetapan APBD tepat waktu yang memiliki target utama dokumen penetapan APBD. Selain itu terdapat 3 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah yang terdiri dari 17 sub kegiatan yang didalamnya terkait penunjang utama dari segi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang memiliki tujuan 1 Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dari bidang pengelolaan BMD terdapat kegiatan pengelolaan BMD yang terdiri dari 7 sub kegiatan yang saling berhubungan dalam perhitungan rasio utilisasi aset di Pemerintah Kota Cimahi.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2024 jenis belanja pada BPKAD Kota Cimahi terdiri belanja operasional, belanja modal belanja transfer dan belanja tidak terduga yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pagu Anggaran total BPKAD Kota Cimahi adalah Rp.29.563.585.657 (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Nilai ini meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2023 BPKAD memiliki anggaran sebesar Rp.28.833.670.767 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga

Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

3.4.1 Belanja Operasional

Pagu Anggaran Belanja Operasional BPKAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.000.740.310, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.678.457.375 atau 91,19 %. Belanja operasional yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel rincian berikut ini :

Tabel 3.16

Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2023

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Pencapaian %
		Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.864.877.382	8.982.410.249	91,05%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	18.090.100.625	3.609.462.064	19,95%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.608.607.650	1.532.627.459	95,28%
Jumlah		29.563.585.657	14.124.499.772	47,78%

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah capaian realisasi terlihat rendah dikarenakan capaian dari kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

3.4.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pada Tahun Anggaran 2024 di

BPKAD Kota Cimahi menganggarkan belanja modal (sesuai anggaran perubahan) sebesar Rp. 142.525.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 135.829.000 atau 95,30%. Belanja modal yang dilaksanakan oleh BPKAD meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

3.4.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh APBD Tahun 2024 Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 14.420.320.347, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 310.089.709 yang dipergunakan untuk penanggulangan keracunan masal, darurat sampah dan pengembalian bantuan keuangan provinsi selama tahun 2024.

3.5 Evaluasi Kinerja

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan/target dibutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh apa keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Evaluasi kinerja membantu memahami kendala-kendala dalam pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan perbaikan dan tujuan dapat tercapai sesuai target.

BPKAD Kota Cimahi pada tahun 2024 melaksanakan evaluasi kinerja per bulan dengan melihat realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi e-reporting. Realisasi fisik dan keuangan pada e-reporting dapat menggambarkan pencapaian realisasi keuangan dan fisik yang dibandingkan dengan perencanaan per bulan yang didasarkan pada anggaran kas pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.17
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP TK : MONA FAUZALIA, S.E.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.167.299.130,00	100,00	1.167.299.130,00	100,00	100,00	1.083.698.123,00	92,84	92,84		
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.999.350,00	100,00	43.999.350,00	100,00	100,00	38.721.910,00	88,01	88,01		
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.150.000,00	100,00	62.150.000,00	100,00	100,00	53.825.000,00	86,60	86,60		
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.977.000,00	100,00	223.977.000,00	100,00	100,00	204.391.250,00	91,26	91,26		
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.204.000,00	100,00	50.204.000,00	100,00	100,00	47.197.000,00	94,01	94,01	Kenaikan harga sehingga mengurangi volume belanja	
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.069.600,00	100,00	27.069.600,00	100,00	100,00	26.290.200,00	97,12	97,12	Pencetakan spanduk tidak terlalu banyak untuk tahun ini	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.044.000,00	100,00	327.044.000,00	100,00	100,00	325.685.418,00	99,58	99,58	Rutin dilaksanakan	
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	81.747.000,00	100,00	81.747.000,00	100,00	100,00	76.114.909,00	93,11	93,11	Arsip BPKAD yang banyak sedangkan	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
											anggaran jasa penataan arsip terbatas		
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.145.000,00	100,00	33.145.000,00	100,00	100,00	22.945.000,00	69,23	69,23	Tidak terserapnya narasumber profesional	
		9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	100,00	84.000.000,00	100,00	100,00		
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000,00	100,00	5.400.000,00	100,00	100,00	2.979.756,00	55,18	55,18	Rutin dilaksanakan	
		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.251.000,00	100,00	15.251.000,00	100,00	100,00	14.782.500,00	96,93	96,93	Tidak ada kendala	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP TK : MONA FAUZALIA, S.E.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.167.299.130,00	100,0 0	1.167.299.130,00	100,0 0	100,0 0	1.083.698.123,00	92,84	92,84		
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.312.180,00	100,0 0	213.312.180,00	100,0 0	100,0 0	186.765.180,00	87,55	87,55	Kurangnya kesadaran untuk melakukan service berkala roda dua	
	PP TK : WENDY ANUGRAH, S.A.B.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	277.169.000,00	100,0 0	277.169.000,00	100,0 0	100,0 0	254.702.250,00	91,89	91,89		
		13	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	19.431.000,00	100,0 0	19.431.000,00	100,0 0	100,0 0	15.739.500,00	81,00	81,00	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		14	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	24.605.000,00	100,0 0	24.605.000,00	100,0 0	100,0 0	19.870.750,00	80,76	80,76	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
		15	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	32.126.000,00	100,00	32.126.000,00	100,00	100,00	29.772.500,00	92,67	92,67	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : WENDY ANUGRAH, TK : S.A.B.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	277.169.000,00	100,0 0	277.169.000,00	100,0 0	100,0 0	254.702.250,00	91,89	91,89		
		16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.676.000,00	100,0 0	30.676.000,00	100,0 0	100,0 0	28.562.500,00	93,11	93,11	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		17	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21.913.000,00	100,0 0	21.913.000,00	100,0 0	100,0 0	17.344.000,00	79,15	79,15		
		18	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	148.418.000,00	100,0 0	148.418.000,00	100,0 0	100,0 0	143.413.000,00	96,63	96,63	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : YANTI RETNO IRIANI, TK : SSTP.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.187.000,00	100,0 0	82.187.000,00	100,0 0	100,0 0	67.276.100,00	81,86	81,86		
		19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.171.000,00	100,0 0	61.171.000,00	100,0 0	100,0 0	53.594.100,00	87,61	87,61	Sasaran kota untuk dijadikan dasar penyusunan draft cascading Perangkat Daerah (BPKAD) masih bersifat masukan/gambaran sementara, yang tentunya akan berpengaruh pada indikator dan sasaran organisasi kebawahnya	
		20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.016.000,00	100,0 0	21.016.000,00	100,0 0	100,0 0	13.682.000,00	65,10	65,10	Terbentur waktu padat di akhir tahun	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : FACHMI NURHAYAT TK : RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.723.666.815,00	100,0 0	15.782.328.821,00	100,3 7	100,0 0	1.382.475.454,00	8,76	8,79		
		21	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.887.800,00	100,0 0	36.887.800,00	100,0 0	100,0 0	35.835.600,00	97,15	97,15	Tidak ada kendala berat yang menghambat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		22	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	461.515.350,00	100,0 0	461.515.350,00	100,0 0	99,98	450.406.955,00	97,59	97,59	Tidak ada kendala berat yang menghambat pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : FACHMI NURHAYAT TK : RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.723.666.815,00	100,0 0	15.782.328.821,00	100,37	100,0 0	1.382.475.454,00	8,76	8,79		
		23	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	68.861.400,00	100,0 0	68.861.400,00	100,0 0	100,0 0	66.897.300,00	97,15	97,15		
		24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25.242.000,00	100,0 0	25.242.000,00	100,0 0	100,0 0	19.157.750,00	75,90	75,90	Pengembalian atas temuan BPK belum seluruhnya terselesaikan, masih ada yang melakukan pencicilan pelunasan	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan SKPD untuk melakukan follow up terhadap pengembalian temuan BPK
		25	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	66.492.000,00	100,0 0	66.492.000,00	100,0 0	100,0 0	46.539.500,00	69,99	69,99		
		26	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.410.200,00	100,0 0	59.410.200,00	100,0 0	100,0 0	53.037.000,00	89,27	89,27		
		27	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	53.268.000,00	100,0 0	53.268.000,00	100,0 0	100,0 0	48.385.900,00	90,83	90,83		
		28	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	28.747.200,00	100,0 0	28.747.200,00	100,0 0	100,0 0	27.892.750,00	97,03	97,03	Terdapat kode rekening belanja yang tidak muncul	Berkoordinasi dengan Pusdatin

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
												di penginputan Transaksi Non ANggaran BOK di SIPD Akuntansi pelaporan	SIPD Provinsi Jawa Barat
		29	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	26.084.800,00	100,00	26.084.800,00	100,00	100,00	24.535.500,00	94,06	94,06		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP TK : FACHMI NURHAYAT RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.595.320.347,00	100,0 0	14.595.320.347,00	100,37	100,0 0	1.382.475.454,00	8,76	8,79		
		30	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	175.000.000,00	100,0 0	175.000.000,00	100,0 0	100,0 0	108.364.375,00	61,92	61,92		
		31	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.420.320.347	100,0 0	14.420.320.347,00	100,4 0	100,0 0	310.089.709,00	2,13	2,13		
		32	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	198.012.450,00	100,0 0	198.012.450,00	100,0 0	100,0 0	191.333.115,00	96,63	96,63	Masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD RI yaitu menu aplikasi yang tidak berfungsi dengan baik, eror system dan beberapa input dokumen penatausahaan yang tidak bisa diproses	Koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin dan melakukan backup data melalui aplikasi SIPKD Nextgen
	PP TK : EBY SUSANTO, S.A.B., M.Ak.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.615.391.252,00	100,0 0	8.615.391.252,00	100,00	100,0 0	7.831.436.026,00	90,90	90,90		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
		33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.612.412.252,00	100,0 0	8.612.412.252,00	100,0 0	100,0 0	7.828.596.026,00	90,90	90,90		
		34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.857.000,00	100,0 0	1.857.000,00	100,0 0	100,0 0	1.720.000,00	92,62	92,62		
		35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.122.000,00	100,0 0	1.122.000,00	100,0 0	100,0 0	1.120.000,00	99,82	99,82		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.												
	PP : HARIS SANTIKA, S.Kom., TK M.T.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.011.997.128,00	100,00	1.011.997.128,00	100,00	100,00	949.398.200,00	93,81	93,81		
		36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	369.984.508,00	100,00	369.984.508,00	100,00	100,00	348.488.500,00	94,19	94,19		
		37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	269.007.400,00	100,00	269.007.400,00	100,00	100,00	263.153.800,00	97,82	97,82	Dikarenakan ada jadwal tahapan yang mundur, maka acara/kegiatan asistensi RKA Perubahan TA 2024 baru dilaksanakan di TW 3 (Agustus)	
		38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	19.433.600,00	100,00	19.433.600,00	100,00	100,00	19.304.900,00	99,34	99,34		
		39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	20.871.400,00	100,00	20.871.400,00	100,00	100,00	20.216.900,00	96,86	96,86		
		40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	241.372.120,00	100,00	241.372.120,00	100,00	100,00	226.125.200,00	93,68	93,68		
		41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	91.328.100,00	100,00	91.328.100,00	100,00	100,00	72.108.900,00	78,96	78,96		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
	PP : DEKI DJOEMOEDILAGA TK PERDANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.181.092.950,00	100,0 0	1.181.092.950,00	100,0 0	100,0 0	1.022.886.160,00	86,61	86,61		
		42	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	169.106.600,00	100,0 0	169.106.600,00	100,0 0	100,0 0	156.382.500,00	92,48	92,48		
		43	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.950.500,00	100,0 0	77.950.500,00	100,0 0	100,0 0	68.706.400,00	88,14	88,14		
		44	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	243.168.650,00	100,0 0	243.168.650,00	100,0 0	100,0 0	214.075.000,00	88,04	88,04		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.												
	PP TK : DEKI DJOEMOEDILAGA PERDANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.181.092.950,00	100,0 0	1.181.092.950,00	100,0 0	100,0 0	1.022.886.160,00	86,61	86,61		
		45	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	521.437.350,00	100,0 0	521.437.350,00	100,0 0	100,0 0	422.490.260,00	81,02	81,02	Kegiatan Studi Tiru ke Sumatera Utara mengalami pengurangan jumlah peserta sehingga sebagian anggaran dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas tim TAPD dan kaji banding ke Rumah Sakit Daerah Dr Iskak Tulung Agung di Kab Tulung Agung	
		46	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	53.348.500,00	100,0 0	53.348.500,00	100,0 0	100,0 0	49.280.000,00	92,37	92,37		
		47	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116.081.350,00	100,0 0	116.081.350,00	100,0 0	100,0 0	111.952.000,00	96,44	96,44		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.											
	PP : IRA TRIANA TK : KUSRIANTINI, S.E., M.Ak.											
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	917.393.100,00	100,00	917.393.100,00	100,00	99,96	883.377.960,00	96,29	96,29	
		48	Pengamanan Barang Milik Daerah	560.892.100,00	100,00	560.892.100,00	100,00	100,00	537.905.000,00	95,90	95,90	Mengumpulkan bukti riwayat perolehan (alas hak) dan aset tanah seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin
		49	Penilaian Barang Milik Daerah	236.607.000,00	100,00	236.607.000,00	100,00	99,86	231.226.260,00	97,73	97,73	Kontrak Naskah Akademik dilakukan di anggaran perubahan sehingga pencairan pekerjaan dilakukan di tanggal 31 Desember
		50	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	119.894.000,00	100,00	119.894.000,00	100,00	100,00	114.246.700,00	95,29	95,29	Kurang lengkapnya data awal dan tingkat pengamanan dari pengguna barang, sehingga menghambat proses

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
											pendataan barang baik dalam proses proses penghapusan, pemanfaatan ataupun pemindahtanganan	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PP TK : EVI YANTI, S.Si.												
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	466.490.700,00	100,0 0	466.490.700,00	100,0 0	100,0 0	436.516.499,00	93,57	93,57		
		51	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	34.054.100,00	100,0 0	34.054.100,00	100,0 0	100,0 0	33.651.100,00	98,82	98,82		
		52	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.208.600,00	100,0 0	16.208.600,00	100,0 0	100,0 0	14.898.100,00	91,91	91,91		
		53	Penatausahaan Barang Milik Daerah	174.062.000,00	100,0 0	174.062.000,00	100,0 0	100,0 0	160.597.699,00	92,26	92,26	Masih ada beberapa data yang belum sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh bidang akuntansi dan masih ada data kendaraan dari Samsat yang belum teridentifikasi di daftar aset, masih ada beberapa format laporan di sistem yang belum sesuai dengan format permendagri	Dilaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan data akuntansi dan rekonsiliasi dengan samsat, Rekonsiliasi dengan akuntansi dan dibuat secara manual dengan data yang ada pada Grafis

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
		54	Inventarisasi Barang Milik Daerah	86.360.000,00	100,00	86.360.000,00	100,00	100,00	83.210.500,00	96,35	96,35	Masih banyak barang yang tidak ditemukan dan permasalahan data pada BMD berupa jalan, jaringan dan irigasi	
		55	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	21.624.000,00	100,00	21.624.000,00	100,00	100,00	20.273.000,00	93,75	93,75		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PP : EVI YANTI, S.Si. TK												
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	466.490.700,00	100,0 0	466.490.700,00	100,0 0	100,0 0	436.516.499,00	93,57	93,57		
		56	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.680.000,00	100,0 0	36.680.000,00	100,0 0	100,0 0	32.984.100,00	89,92	89,92	Banyak data yang belum sesuai dengan LRA sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan	
		57	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	97.502.000,00	100,0 0	97.502.000,00	100,0 0	100,0 0	91.082.000,00	93,23	93,23		
	PP : RONA MUKHTAR TK SHIDIQIE, S.T.												
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	224.723.850,00	100,0 0	224.723.850,00	100,0 0	100,0 0	212.123.000,00	94,39	94,39		
		58	Penyusunan Standar Harga	224.723.850,00	100,0 0	224.723.850,00	100,0 0	100,0 0	212.123.000,00	94,39	94,39		
	Total/Rata-rata			29.667.410.925,00	100,0 0	29.726.072.931,00	100,2 0	100,0 0	14.124.499.772,00	47,78	47,61		

Evaluasi kinerja di BPKAD juga dilaksanakan per triwulan didasarkan kepada akumulasi realisasi fisik dan keuangan serta capaian target per triwulan. Capaian per triwulan juga melihat sejauh progres pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Evaluasi per triwulan dilaksanakan bersamaan dengan rapat internal BPKAD, sekaligus membahas isu-isu ataupun permasalahan lain diluar capaian target kinerja. Selain dalam rapat internal, Bappelitbangda juga melaksanakan monev capaian kinerja dengan dasar yang sama yaitu melihat realisasi fisik dan keuangan hanya saja dengan secara rinci melihat progres pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang menghambat.

Selain melihat realisasi fisik dan keuangan, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan dengan melihat rencana aksi dan rencana kerja yang telah dibuat dan direncanakan dalam tahun 2024, serta pada akhir triwulan dibandingkan kepada capaian akhir renstra.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024 ini, dapat kami simpulkan bahwa BPKAD Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja sebesar 104,08 %. terhadap satu sasaran strategis yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja penetapan APBD secara tepat waktu, presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah serta rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah, untuk mendukung pelaksanaan Misi Wali Kota Cimahi yang kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2024 dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja BPKAD Kota Cimahi, maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang yang di antaranya :

1. Pencapaian Peningkatan Rasio Utilisasi Aset;
2. Pencapaian Indeks Pengelolaan Aset;
3. Mempertahankan Laporan Kinerja BPKAD Nilai “A”;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Penambahan kebijakan-kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. *Adaptive* terhadap perubahan kondisi dan peraturan serta perundang-undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pemanfaatan aset;

2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan dan SIPD;
3. Mengikuti pelatihan, pembinaan dan konsultasi bagi ASN BPKAD Kota Cimahi;
4. Menyusun analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang ada pada BPKAD Kota Cimahi sehingga dapat memetakan kebutuhan pegawai;
5. Mapping tugas pokok dan fungsi diperkuat penyusunan SOP;
6. Koordinasi secara intensif kepada internal maupun eksternal.

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Link Google Drive
1	SOP Penyusunan Renja dan Renstra	https://bit.ly/3DaC9KE
2	RPJPD Kota Cimahi 2005-2025	
3	RPD Kota Cimahi 2023-2026	
4	Renstra BPKAD Kota Cimahi 2023-2026	
5	Renja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024	
6	Renja Perubahan BPKAD Kota Cimahi Tahun 2024	
7	Rencana Aksi 2024	
8	RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2024	
9	Screenshoot Renja, Renja Perubahan dan LKIP di ESR	
10	Pohon Kinerja 2024	
11	Cascading Renstra 2023-2026	
12	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2024	
13	SKP Pegawai Tahun 2024	
14	Monev Per Triwulan Tahun 2024	
15	Monev Rencana Aksi Tahun 2024	
16	LKIP Tahun 2024	
17	SK Tim LKIP 2024	
18	SK IKU, SK Renja	
19	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	
20	SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja	

21	SOP Evaluasi Kinerja Internal	
22	Perwal TPP	
23	SP Mutasi, Rotasi dan Mutasi	
24	Reviu LKIP 2024	
25	Sertifikat ASN Mengikuti Diklat SAKIP	
27	LHE AKIP Tahun 2023	
28	TL LHE AKIP Tahun 2023	